

IMPLEMENTASI PENGAWASAN DANA PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI DI PROVINSI JAWA BARAT WILAYAH XIII

Rini Indah Sari¹

Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul Ulama
Al-farabi Pangandaran¹
riniindahsari01@gmail.com¹

Irfan Afandi²

Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul Ulama
Al-farabi Pangandaran²
irfanafandi463@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the implementation and management of education finance. The implementation of school education financial management is carried out and carried out the function of education finance, especially the management of BOS funds, and even then it is still constrained carefully before BOS funds are received and the slow disbursement of funds from policy determinants that affect the next program. In accordance with this fact, the author suggests that it is better to implement school financial management, especially in the management of BOS funds, to improve the management system in administrative management, especially in the collection of pedagogic data to complete the BOS admission requirements funding for the school so that plans can be implemented and the principal's skills to find other sources of funding to overcome the limitations found.

Keywords : Supervision, Boss fund, Education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan dan pengelolaan keuangan pendidikan. Implementasi manajemen keuangan pendidikan sekolah dilakukan dan dilaksanakan fungsi keuangan pendidikan khususnya pengelolaan dana BOS, dan itupun masih terkendala dengan teliti sebelum dana BOS diterima dan lambatnya pencairan dana dari faktor-faktor penentu kebijakan yang mempengaruhi program selanjutnya. Di dalam Sesuai dengan kenyataan tersebut, penulis menyarankan agar lebih baik untuk dilaksanakan pengelolaan keuangan sekolah, khususnya dalam pengelolaan dana BOS, untuk meningkatkan sistem manajemen dalam manajemen administrasi, khususnya di pengumpulan data pedagogik untuk melengkapi persyaratan penerimaan BOS dana untuk sekolah sehingga rencana dapat dilaksanakan dan keterampilan kepala sekolah untuk mencari sumber pendanaan lain untuk mengatasi keterbatasan yang ditemukan.

Kata Kunci : Pengawasan, dana Bos, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan ialah usaha yang dilaksanakan sistematis dan dengan sengaja untuk memotivasi, membina dan membantu serta membimbing seseorang

dalam mengembangkan segala kompetensinya sehingga mampu mencapai kualitas diri yang lebih baik.¹ Pendidikan bukan suatu produk yang langsung jadi secara instan, tetapi pendidikan merupakan suatu proses dan layanan. Proses dan layanan akan berjalan baik apabila semuanya sudah sepakat, bahwa pendidikan harus dibangun sejalan antara pembangunan, ketersediaan fisik tenaga pendidik dan kependidikan yang Berkualitas sehingga mampu mendorong proses layanan pendidikan sesuai dengan apa yang diharapkan.² Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Provinsi sebagai daerah otonom telah mendorong perubahan signifikan pada sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia.³ Dan oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat juga sebagai tanggung jawab pemerintah daerah.

Didalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 menyatakan tentang sistem pendidikan nasional disebutkan sumber daya pendidikan ialah merupakan pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berwujud tenaga, biaya, sarana dan prasarana yang ada atau diadakan dan digunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik individu maupun secara umum. Dalam pasal yang lain juga dikatakan secara lebih rinci bahwa pengadaan dan penggunaan sumberdaya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan/ atau keluarga peserta didik dan semua stakeholder.

Untuk penyaluran dana BOS yang disalurkan kepada setiap sekolah merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang mana pembiayaannya langsung diserahkan kepada pihak sekolah serta dikelola sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kepada petunjuk teknis yang sudah ditetapkan pemerintah. Arahan teknis tersebut berisi tentang penggunaan dan pertanggung-jawaban keuangan BOS yang dibentuk dengan harapan bahwa pengelolaan biaya BOS tepat sasaran,⁴

Salah satu jenis pembiayaan pendidikan adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah telah memprioritaskan beberapa program dalam pembangunan, seperti untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan bantuan anggaran yang cukup besar adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).⁵ Alokasi dana pemerintah dalam

¹ ROHATIN ARIANINGSIH, "PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIF LEARNING TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP HASIL BELAJAR PADA SISWA KELAS IV MATERI POKOK KETERAMPILAN MEMBACA INTENSIF SDN 6 RENSING TAHUN PELAJARAN 2019/2020." (diploma, Universitas Hamzanwadi, 2019), <https://eprints.hamzanwadi.ac.id/4063/>.

² Urip Triyono, *Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan: (Formal, Non Formal, dan Informal)* (Deepublish, 2019).

³ R.I, "UU No. 32 Tahun 2004," Database Peraturan | JDIH BPK, accessed July 15, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>.

⁴ Sulfiati F, Andi Samsu Alam, and Andi Lukman Irwan, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sinjai," *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2010, 113–22, <https://doi.org/10.31947/jgov.v3i2.1564>.

⁵ 2120041001 BAYU SAPUTRO, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN NELAYAN PESISIR DESA MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR" (masters, UNIVERSITAS LAMPUNG, 2022), <http://digilib.unila.ac.id/68040/>.

bidang pendidikan dalam bentuk dana BOS merupakan konsekuensi dari berkurangnya subsidi di sektor lain, sehingga bidang pendidikan mendapatkan kucuran anggaran yang cukup dalam membiayai aktivitas pendidikan.⁶ Anggaran pendidikan yang dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan mengalokasikan dana bagi sektor pendidikan, maka pemerintah menunjukkan perhatian pada bidang pendidikan sebagai bidang penting dalam pembangunan bangsa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).⁷

Dana BOS yang disalurkan kepada setiap sekolah merupakan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang mana pembiayaan secara langsung diserahkan kepada pihak sekolah untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan.⁸ Dengan berdasar kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Petunjuk teknis tersebut berisi tentang penggunaan dan pertanggung-jawaban keuangan dana BOS yang dibuat agar supaya harapan pengelolaan dana BOS tepat sasaran, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa masih ada sekolah di Kabupaten Pangandaran yang tidak mencermati petunjuk tersebut. Sehingga dalam menjalankan dana BOS terkadang ada saja sekolah yang belum faham sehingga melakukan perbelanjaan diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis. Masalah tersebut diakibatkan karena kurangnya koordinasi antara kepala sekolah, bendahara BOS dan guru. Serta pihak sekolah tidak melakukan tugasnya untuk menginformasikan daftar komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai penggunaan dana BOS tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Untuk mendapatkan informan yang tepat dan sesuai tujuan, dalam memilih informan digunakan teknik purposive.⁹ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Teknik wawancara, dokumen, dan studi pustaka.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶ Prita Indriawati and Ririn Suyanti, "Analisis Manajemen Keuangan Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)," *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik* 1, no. 12 (December 20, 2022): 826–35, <https://doi.org/10.54543/etnik.v1i12.135>.

⁷ Agarita Clara Womsiwor, Siti Rofingatun, and Theo Allolayuk, "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Distrik Demta Kabupaten Jayapura)," *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH* 15, no. 1 (December 13, 2020): 92–99, <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1468>.

⁸ Muhammad Yusra et al., "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Di Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara: Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Visioner & Strategis* 10, no. 1 (March 20, 2021), <https://ojs.unimal.ac.id/visi/article/view/4834>.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono*, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2014), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>.

¹⁰ Zuchri Abdussamad, "Buku Metode Penelitian Kualitatif" (OSF Preprints, January 11, 2022), <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional dan nonpersonalia untuk bantuan pendidikan mendasar sebagai pelaksana program wajib belajar.¹¹ Program Bantuan Operasional sekolah (BOS) yang di mulai sejak bulan juli 2005, telah berperan penting secara melonjak dalam meningkatkan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Oleh sebab itu, mulai tahun 2009 telah dilaksanakan perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi program BOS, berawal dari perluasan akses menuju pengembangan kualitas.

Penggunaan sumber dana BOS diutamakan untuk kegiatan pokok sekolah yang dialokasikan pada kegiatan kesiswaan, yang meliputi: pengembangan standar proses, pengembangan standar penilaian, pengembangan standar pembiayaan, dan pengembangan standar sarana prasarana yang mengacu pada 8 standar proses dan 13 Item komponen penggunaan dana BOS yang menunjang peningkatan kemajuan dan kualitas mutu pendidikan sekolah.¹²

Pengalokasian dana BOS di sekolah harus ditujukan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, Komite Sekolah, dan semua stakeholder. Hasil kesepakatan bersama diatas harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh semua peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan yang di perlukan sekolah, pada khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan.

Pencairan Dana BOS yang diperoleh sesuai dengan jumlah siswa disekolah tersebut serta pengalokasian dana BOS sesuai RKAS/RAPBS. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab pengalokasian anggaran di sekolah dan juga bertanggung jawab atas kebijakan penggunaan anggaran tersebut. Bentuk Pertanggung jawaban di buat laporan setiap akhir bulan dalam setiap tahun.laporan di buat setelah terjadinya transaksi melalui rekening sekolah bank BJB.

Agar pengelolaan dana BOS berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka dibentuklah tim manajemen BOS mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten hingga tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, penanggung jawab pelaksanaan program BOS adalah kepala sekolah dengan anggota bendahara BOS sekolah dan Komite Sekolah sebagai perwakilan orang tua siswa, Peran Komite disini hanya mengetahui tentang penyaluran dana Bos yang akan digunakan dan ikut bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, sehingga menghindari terjadinya konflik kepentingan tapi yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tentang dana BOS tersebut adalah Kepala sekolah

Untuk pengawasan penyaluran Dana Bos di Provinsi Jawa Barat Wilayah XIII melibatkan Pengawasan Pembina, Pengelolaan Keuangan KCD, Inspektorat

¹¹ Sigit Wahyudi, "PERANAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM UPAYA MENUNTASKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI MTS NW TEROS TAHUN ANGGARAN 2019/2020," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (June 9, 2021): 32–52.

¹² Irene Muryati, "PENGELOLAAN DANA BOS PADA SD NEGERI DI UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (September 22, 2016): 237–46, <https://doi.org/10.21831/amp.v4i2.10802>.

Provinsi, Pengelolaan Keuangan Disdik Provinsi, BPKAD Provinsi, BPK, dan Kejaksaan. Berdasarkan laporan sekolah dan hasil dari monitoring serta evaluasi yang dilaksanakan Tim satuan Pendidikan membuat laporan dan di input melalui aplikasi ARKAS yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat wilayah XIII.

Laporan di buat setiap akhir bulan oleh satuan pendidikan yang disampaikan melalui kantor cabang dinas pendidikan wilayah XII untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi Laporan pencairan Dana tidak harus di laporkan kepada Tim Monitoring ataupun Evaluasi.

Setelah selesai menjalankan Manajemen Pengelolaan dan pengawasan Dana BOS dengan baik, selanjutnya melakukan Evaluasi pengelolaan dana BOS, serta Evaluasi Dana BOS dapat dilaksanakan oleh pengelola didalam maupun di luar sekolah. Evaluasi pelaksanaan di dalam dilaksanakan oleh evaluator sekolah yakni Tim Manajemen BOS sekolah. Evaluasi internal lebih kepada bersifat bimbingan serta evaluasi diri. Sedangkan evaluasi eksternal dilaksanakan oleh pihak luar sekolah yang telah diberikan perintah oleh pemerintah untuk memeriksa maupun melakukan pengarahan terhadap seluruh pelaksanaan program dana BOS yang akan dilakukan oleh sekolah. Pelaksanaan evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), dan atau Badan Pengawas Keuangan serta Pembangunan (BPKP).

KESIMPULAN

Pengelolaan dana BOS di Sekolah Negeri se-Provinsi Jawa Barat Wilayah XIII dilakukan secara teliti, jujur, detail, efektif dan efisien. Sehingga dengan demikian, dana BOS dapat menunjang keberhasilan serta peningkatan kualitas pendidikan, hal yang menonjol khususnya bagi peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Selain itu juga, peningkatan serta perubahan terlihat pada kualitas siswa yang cukup meningkat dimana ditunjukkan dengan adanya prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa dengan pengelolaan yang baik, jujur dan profesional, anggaran dana BOS yang diterima madrasah dapat memberikan dampak cukup baik bagi peningkatan kualitas madrasah dan siswa.

Sekolah Negeri di Provinsi Jawa Barat Wilayah XIII mendapatkan pencairan dana melalui Rekening Sekolah dan melaporkan Melalui Aplikasi ARKAS yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat Wilayah XIII, Setelah penginputan data, bendahara melakukan laporan setiap sebulan sekali disampaikan melalui kantor cabang dinas pendidikan wilayah XII untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi Laporan pencairan Dana tidak harus di laporkan kepada Tim Monitoring ataupun Evaluasi.

Pengawasan Dana BOS dilakukan Oleh Pengawasan Pembina, Pengelolaan Keuangan KCD, Inspektorat Provinsi, Pengelolaan Keuangan Disdik Provinsi, BPKAD Provinsi, BPK, dan Kejaksaan. Dan tim evaluasi dan monitoring dilakukan oleh Bawasda dan Inspektorat. Jadi pengawasan di sekolah Negeri Jawa Barat Wilayah XIII berjalan sangat Efektif dan Efisien karena pengalokasian dana BOS sesuai RKAS/RAPBS. Yang tangani langsung oleh kepala sekolah dan satuan tim pendidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. "Buku Metode Penelitian Kualitatif." OSF Preprints, January 11, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.
- ARIANINGSIH, ROHATIN. "PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIF LEARNING TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) TERHADAP HASIL BELAJAR PADA SISWA KELAS IV MATERI POKOK KETERAMPILAN MEMBACA INTENSIF SDN 6 RENSING TAHUN PELAJARAN 2019/2020." Diploma, Universitas Hamzanwadi, 2019. <https://eprints.hamzanwadi.ac.id/4063/>.
- BAYU SAPUTRO, 2120041001. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN NELAYAN PESISIR DESA MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR." Masters, UNIVERSITAS LAMPUNG, 2022. <http://digilib.unila.ac.id/68040/>.
- F, Sulfiati, Andi Samsu Alam, and Andi Lukman Irwan. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Sinjai." *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2010, 113–22. <https://doi.org/10.31947/jgov.v3i2.1564>.
- Indriawati, Prita, and Ririn Suyanti. "Analisis Manajemen Keuangan Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)." *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik* 1, no. 12 (December 20, 2022): 826–35. <https://doi.org/10.54543/etnik.v1i12.135>.
- Muryati, Irene. "PENGELOLAAN DANA BOS PADA SD NEGERI DI UPT PELAYANAN PENDIDIKAN KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4, no. 2 (September 22, 2016): 237–46. <https://doi.org/10.21831/amp.v4i2.10802>.
- R.I. "UU No. 32 Tahun 2004." Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed July 15, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2014. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>.
- Triyono, Urip. *Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan: (Formal, Non Formal, dan Informal)*. Deepublish, 2019.
- Wahyudi, Sigit. "PERANAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM UPAYA MENUNTASKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI MTS NW TEROS TAHUN ANGGARAN 2019/2020." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (June 9, 2021): 32–52.
- Womsiwor, Agarita Clara, Siti Rofingatun, and Theo Allolayuk. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Distrik Demta Kabupaten Jayapura)." *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH* 15, no. 1 (December 13, 2020): 92–99. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1468>.
- Yusra, Muhammad, Nur Afni Yunita, Nurhasanah Nurhasanah, and Arliansyah Arliansyah. "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Di Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara: Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi."

Jurnal Visioner & Strategis 10, no. 1 (March 20, 2021).
<https://ojs.unimal.ac.id/visi/article/view/4834>.